

# PENUTUP

Sebagai bagian akhir dari penelitian ini, penulis menyimpulkan beberapa hal yang menjadi temuan-temuan penulis selama melakukan penelitian. Kiai di Bangkalan merupakan pemegang “kuasa” dalam persoalan keagamaan, yang berposisi sangat terhormat. Melalui posisi tersebut, kiai mampu mempengaruhi, menggerakkan aksi sosial para santri, masyarakat serta pejabat publik, dan tidak jarang sosok kiai berpartisipasi dalam segala penentuan kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan di Bangkalan. Setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi temuan penulis sekaligus menjawab rumusan masalah penelitian ini diantaranya:

261

*Kedua*, bentuk partisipasi kiai pesantren dalam penentuan kebijakan pendidikan di Bangkalan tidak dapat dihindarkan, meski sebagian kiai tidak terikat dengan partisipasi tersebut. Partisipasi kiai terjadi bukan hanya latar belakang kiai dari lembaga pendidikan Islam (pesantren) dengan kerangka keilmuannya. Akan tetapi hubungan ini juga terjadi sejak proses pemilihan Kepala Daerah secara langsung, karena mereka adalah potensi lokal yang dapat memberikan kontribusi atau memberi warna tersendiri bagi perpolitikan di tingkat daerah. Partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan pendidikan di Bangkalan memiliki bentuk yang bermacam-macam, sesuai dengan partisipasi yang dimainkan oleh kiai, ustad, *nyai*, atau santri. Penulis memetakan beberapa bentuk partisipasi kiai dengan mengamati berbagai proses partisipasi kiai pesantren dalam penentuan kebijakan pendidikan di Bangkalan diantaranya: *pertama*, partisipasi Intensif, yaitu kiai aktif terlibat langsung dalam pemerintahan (mencolok), di mana mereka berperan sebagai pembuat kebijakan sekaligus konsultan kebijakan. *Kedua*, partisipasi moderat, yaitu kiai tidak terlalu terjun langsung dalam penentuan kebijakan pendidikan tidak aktif tidak pula pasif, dan *ketiga*, partisipasi konfrontatif, yaitu partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan lebih kepada hubungan institusional dengan pola yang cenderung kontra terhadap pemerintah.

*Ketiga*, implikasi partisipasi kiai dalam penentuan kebijakan pendidikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan Islam di Bangkalan. Analisis terhadap

## B. Implikasi Teoretik

Ada beberapa teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini, mulai dari teori hegemoni Antonio Gramsci, teori kekuasaan Michael Foucault dan teori kebijakan publik William N. Dunn. Ketiganya penulis gunakan untuk menganalisis partisipasi kiai pesantren dalam penentuan kebijakan pendidikan di Bangkalan. Dominasi kiai di Bangkalan itu merupakan bagian dari pengaruh kuat Bani Kholil. Sehingga dengan mudah kiai memperoleh, menjalankan dan mempertahankan kuasa dalam pusaran politik di Bangkalan. Di sisi lain, ini adalah *power of culture* sekaligus *power of legitimate* yang dimiliki kiai di





#### D. Rekomendasi

Dalam melakukan perencanaan pendidikan kabupaten Bangkalan, pertama-tama perlu dilakukan analisis lingkungan strategis, yang kemudian dilanjutkan dengan analisis situasi untuk mengetahui "situasi pendidikan saat ini" dan "situasi pendidikan yang diharapkan atau ditargetkan" menyangkut berbagai kebijakan pendidikan yang ditetapkan, sehingga kesenjangan dapat diketahui melalui kebijakan *substantif, implementatif*, program serta rencana kegiatan yang dapat dipikirkan secara *integrated*. Dalam konteks penyusunan perencanaan kebijakan pendidikan, termasuk dalam perencanaan pendidikan di Kabupaten Bangkalan, diperlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, serta masyarakat melalui suatu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Pada regulasi inilah sosok kiai yang notabene seorang yang sangat dihormati dalam kultur masyarakat Madura, mengambil peranan serta ikut berpartisipasi dalam penentuan kebijakan pendidikan.

Sudah di ketahui bahwa kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam kurun waktu tertentu. Di mana terdapat kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah di antaranya kebijakan yang diturunkan pada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati atau regulasi lain.